

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Sejarah pers sangat erat kaitannya dengan era demokrasi yang berjalan saat itu, mulai dari tahun 1945-1959 setelah pembacaan teks proklamasi media menjadi bagian dalam partai ideologi, aliran politik maupun primordial. Saat itu pers cenderung bersifat anarkis karena merupakan sebuah cerminan kehidupan politik yang berjalan saat itu. Pada tahun itu Indonesia berada pada era Demokrasi Liberal. Pada tahun 1959-1966 Indonesia masuk pada era Demokrasi Terpimpin, dimana pada saat itu pers dihadapi oleh pemerintah dengan tindakan keras. Semua media diwajibkan untuk menjadi pedoman dan pembela bagi politik yang dijalankan. Artinya semua gerakan yang dilakukan pemerintah harus didukung oleh pers. Era ini sering disebut sebagai Orde Lama, dan pada masa ini kebebasan pers belum didapat.

Baru setelah memasuki tahun 1966-1998, kebebasan pers mulai menemukan titik terang. Era ini disebut sebagai Demokrasi Pancasila yang saat itu dipimpin oleh presiden Soeharto. Banyak orang menyebut tahun ini sebagai Orde Baru, akan tetapi kebebasan hanya berlangsung 8 tahun tepatnya pada tahun 1966-1974. Alih-alih mendapat kebebasan pers justru dunia media kembali harus masuk pada masuk terpuruk setelah pembredelan yang terjadi kepada harian Indonesia Raya pada 15 Januari 1974. Orang lebih mengenal peristiwa ini dengan "Peristiwa malar", mulai dari sinilah awal mula sejarah bagi Kompas. Dahulu Kompas mempunyai nama "Pentara Rakyat" yang dikenal surat kabar yang idealis

Setelah peristiwa tersebut Kompas berubah menjadi interpreter pernyataan pemerintah (Harahap, 2000 : 127-143).

A. Profil Kompas

Awal pembentukan Kompas merupakan gagasan dari Jendral Ahmad Yani yang meminta Frans Seda. Ketika itu Frans Seda menjabat sebagai pimpinan Partai Katolik yang merangkap sebagai Menteri Perkebunan atas pemerintahan Jendral Ahmad Yani. Akhirnya keinginan tersebut diteruskan kepada para petinggi Partai Katolik yaitu P.K. Ojong dan Jacob Oetama. Mereka berdua sebelumnya telah sukses dengan bulanan Intisari pada tahun 1963 (Hasrullah, 2001 : 13).

Bentara Rakyat nama yang dulu dipakai oleh Kompas, hal ini didasari karena semua koran, penerbitan maupun organisasi harus menggunakan kata "rakyat". Hal tersebut dilandasi karena penggunaan kata tersebut agar rakyat mengerti bahwa bukan PKI yang membela rakyat. Kompas sendiri berbeda dibanding dengan koran lain yang berada pada naungan PKI. Pada saat itu PKI memanipulasi kata "rakyat" untuk menindas rakyat. Karena pada tahun 1965, suhu politik Indonesia memanas karena PKI menyerukan untuk membentuk angkatan kelima guna menghadapi ABRI. PKI sendiri juga melakukan penyerobotan tanah milik negara. Disamping itu PKI juga banyak menguasai media yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah Kompas digunakan sebagai alat yang menandingi media dibawah naungan PKI (Anonim, 2007 : 99).

Kompas pertama diterbitkan pada 18 Juni 1965, yang pada saat itu

hanya menyajikan 4 halaman dengan 11 berita luar negeri dan 7 berita dalam negeri serta hanya mencetak 800 eksemplar dan belum memiliki tajuk rencana. Namun pada halaman kedua ada catatan dari pemimpin redaksi terkait tentang lahirnya Kompas. Kompas pun pada awal kemunculannya bukan merupakan koran harian akan tetapi hanya terbit empat kali seminggu. Baru setelah dua tahun berjalan Kompas menjadi surat kabar harian dengan jumlah 30.650 eksemplar (<http://www.kompasgramedia.com/aboutkg/history> diakses tanggal 29 Juli 2012).

Awal mula Kompas sangat berkaitan erat dengan Partai Katolik, hal tersebut terjadi karena pendirinya yaitu P.K Ojong dan Jacob Oetama merupakan petinggi dari partai tersebut. Hal tersebut menjadi wajar saat ideologi partai juga berpengaruh pada surat kabar (Hill, 1995 : 11). Surat kabar harian yang berdiri di bawah naungan Kelompok-Gramedia ini sering kali mendapat label nasionalis sekuler, namun juga tidak lepas dari label koran yang berfiliasi nasrani (Nugraha, 1999 : 4)

Menurut David T. Hill dikatakan bahwa Kompas merupakan harian Cina Jawa Katolik yang independen (Hill, 1995 : 9). Oleh karena itu kondisi Indonesia dengan jumlah penduduk yang begitu besar tentu saja merupakan peluang besar bagi para pelaku bisnis media dan hiburan (Hill, 1995 : 13).

Kompas merupakan media yang sangat selektif dalam menampilkan berita-beritanya. Dari sebuah hasil analisis teks eklektif terhadap 9 parpol, Kompas sendiri ternyata memberikan porsi yang berimbang sesuai massa partainya. Partai besar seperti PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN cukup banyak

memberi citra negatif pada partai Golkar yang dianggap sebagai partai pro-status quo (Harahap, 2000 : 136).

Kompas sendiri pernah mengalami pembredelan oleh pemerintah, hal tersebut terjadi setelah terjadi peristiwa G30S/PKI. Pembredelan dilakukan kepada semua media dan berlangsung mulai tanggal 2-6 Oktober 1965 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Perang Daerah Jakarta Raya. Pada masa itu hanya media yang berasal dari pemerintah yang boleh terbit. Pembredelan yang kedua terjadi pada akhir tahun 1977 dan awal 1978 (Harahap, 2000 : 138).

Pada tahun 1970, P.K Ojong mendirikan Toko Buku Gramedia, untuk memperkuat penyebaran distribusi buku-buku yang berasal dari luar negeri. Berlanjut pada tahun berikutnya kembali Kompas mendirikan sebuah percetakan Gramedia, hal tersebut bukan tanpa alasan karena langkah tersebut dilakukan untuk menjamin Kompas dapat ternit di pagi hari. Alhasil percetakan ini disahkan oleh Ali Sadikin pada tahun 1972 yang saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tahun-tahun selanjutnya Kompas terus berkembang hingga pada 1997, mereka mengembangkan sebuah sistem yang disebut *remote printing* untuk mempercepat distribusi di tiap-tiap daerah (Anonim, 2007 : 8).

Tahun 1990-an Kompas memiliki 38 anak perusahaan dibawah naungannya yang kemudian lebih banyak dikenal sebagai Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Selain itu Kompas juga membuka cabang atau kantor-kantor perwakilan diberbagai daerah diantaranya Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makasar, Palembang, Pontianak, dan Medan. Seiring berjalannya

waktu Kompas kemudian memiliki kesigama dengan kantor berita Antara

Reuters, Associated Press (AP) dan dan beberapa kantor berita asing (Anonim, 2007 : 56).

Perkembangan Kompas sangat pesat dimana mereka mencapai 500.000 eksemplar pada rata-rata tiap kali melakukan penerbitan dengan distribusi keseluruh Indonesia. Bahkan Kompas memiliki sumber wartawan yang berjumlah 230 yang tersebar diberagam kota seperti Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai Papua (Anonim, 2007 : 70).

Seperti kebanyakan koran lain Kompas sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu pertama, bagian berita nasional dan internasional. Bagian kedua, berupa bisnis dan keuangan. Dan bagian terakhir yaitu olahraga. Kompas melakukan berbagai kegiatan guna memperbaiki seluruh kinerjanya, salah satu yang dijalankan adalah dengan memberikan sebuah standar industri. Hal ini adalah berkaitan tentang audit terhadap sirkulasi Kompas, dan semacam itu mereka selalu menyerahkannya kepada perusahaan terpercaya yang bekerja dalam bidang tersebut. *Audit Bureau of Circulations* adalah perusahaan yang dipercaya Kompas dalam menangani hal semacam itu (Anonim, 2007 : 71-72).

Menurut Ibnu Hamad ada tiga strategi yang dilakukan Kompas dalam membahas masalah yang sensitif yaitu *pertama*, model jalan tengah (MJT) adalah sebuah strategi menggugat secara tidak langsung, tapi disampaikan secara santun terkesan berputar-putar dan mengaburkan pesan yang hendak disampaikan. Model inilah yang dipakai Kompas pada saat Orde Baru berjalan dibawah pemerintahan Soeharto. *Kedua*, model angin surga (MAS) yaitu bukan menggugat atau

Ketiga, model anjing penjaga (MAP) bersifat terbuka dan cenderung menggunakan bahasa yang lebih berani (Hamad, 2004 : 117).

Menurut buku yang ditulis oleh Kompas dengan judul “Kompas Menulis dari Dalam” ada beberapa kriteria yang mendasari visi dan misi Kompas diantaranya adalah menghargai nilai manusia, mengutamakan watak baik, profesionalisme, semangat kerja tim, berorientasi pada kepuasan konsumen serta tanggung jawab sosial.

Sehingga Kompas pun menjabarkan visi tersebut “Menjadi Institusi yang Memberikan Pencerahan bagi Perkembangan Masyarakat Indonesia yang Demokratis dan Bermartabat serta Menjunjung tinggi Nilai Asas Kemanusiaan”, namun pada akhirnya pada tahun 2007 hal tersebut berubah “Menjadi Agen Perubahan membangun komunitas Indonesia yang Lebih Harmonis, Toleran, aman & Sejahtera dengan Mempertahankan Kompas Sebagai Market Leader secara Nasional Melalui Optimalisasi Sumber Daya Serta Sinergi Bersama Mitra Strategis” (Anonim, 2007 : 75).

B. Profil Republika

Kemunculan surat kabar harian Republika berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 5 Desember 1990. Ikatan tersebut memiliki program yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas iman, kualitas hidup, kualitas kerja, kualitas karya dan kualitas pikir. Tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat yang berdedikasi tinggi dan berkeinginan untuk membangun bangsa serta beragama Islam membentuk sebuah

Yayasan Abdi Bangsa. Mereka mendirikan Yayasan tersebut pada tanggal 17 Agustus 1990 (Hill, 1995 : 84)

Beberapa program utamanya adalah pembangunan *Islamic Centre*, pengembangan *Centre of Information and Development Studies (CIDES)*, serta yang akan kita bahas yaitu penerbitan koran Republika. Yayasan itu sendiri didirikan oleh 48 orang yang terdiri dari para menteri, pejabat tinggi, cendekiawan, tokoh masyarakat serta para pengusaha. Nama-nama yang mungkin tidak asing bagi kita yaitu Ir. Drs. Ginanjar Kartasasmita, H. Harmoko, Ibnu Sutowo, Muhammad Hasan, Ibu Tien Soeharto, Probosutedjo, Ir. Aburizal Bakrie, Nurcholis Majid, Amien Rais, Quraish Shihab, dan lain sebagainya. Pada saat itu pemerintah sedang dijabat oleh presiden Soeharto yang juga merupakan pelindung bagi yayasan tersebut. ICMI kala itu diketuai oleh B.J Habibie yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Abdi Bangsa (Hamad, 2004 : 120-121).

Langkah pertama dalam merealisasikan program awal yaitu pada 28 November 1992 Yayasan Abdi Bangsa mendirikan PT Abdi Bangsa. Hal tersebut berguna untuk menerbitkan surat kabar atau cikal bakal munculnya Republika. Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) dapat diraih pada tanggal 19 November 1992 dengan nomor 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992 dari Departemen Penerangan. Republika muncul pertama kali pada 4 Januari 1993, nama Republika sendiri berasal dari Presiden Soeharto yang kala itu menjabat. Awalnya Soeharto menambatkan nama "Suarabli" akan tetapi pada saat muncul diubah menjadi

Republika sebenarnya merupakan motivator bagi umat Islam karena pada masa sebelumnya, pers Islam belum dapat bersaing pada ranah nasional. Media ini tidak hanya berupa saluran aspirasi umat Islam melainkan juga dapat berperan menumbuhkan nilai pluralisme informasi dalam masyarakat. Pada akhirnya PT Abdi Bangsa menjual saham kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengembangkan usaha. Namun penjualan saham tersebut memiliki sistem bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu lembar saham. PT Abdi Bangsa menawarkan sekitar 2,9 juta saham, dengan itu perusahaan tersebut menjadi pemegang rekor di dunia karena memiliki jumlah pemilik saham terbesar (Hill, 1995 : 124).

Namun ada yang menarik tentang perusahaan ini tatkala David T. Hill menggambarkan bahwa Republika dibentuk bersama atas pengaruh beberapa bangsa besar dari para intelektual Islam Liberal dan jurnalis, hal tersebut menjadi sebuah spekulasi untuk memproduksi koran berkualitas dimana seluruh peristiwa dicakup dengan lebar oleh sebuah koran sekuler yang berisi tentang ideologi Islam sama halnya seperti Kompas dan Suara Pembaruan yang berideologi Kristen.

Hill juga mendeskripsikan bahwa Republika memiliki watak ganda dari awal. Ada sebuah kepentingan kelas menengah muslim, intelektual dan jurnalis yang terlibat didalamnya. Dimana pada saat itu pers Islam kalah dari media sekuler dan Kristen, sehingga era Orde Baru menjadi ajang bagi pemerintahan yang meniadakan untuk memunculkan media Islam (Hill, 1994 : 125).

Pertama kali Republika terbit didasari oleh sebuah latar belakang politik yang penting, di mana mereka hadir ditengah pembaca mayoritas Islam akan tetapi media dikuasai oleh kelompok Kristen. Hill juga menambahkan bahwa semua ini mengejutkan banyak pengamat luar negeri, karena sementara lebih dari 80% masyarakat Indonesia dikelompokkan sebagai muslim, sedangkan dua koran terbesar di Indonesia bekerjasama dengan Kristen. Singkat kata media Islam terpinggirkan oleh banyak ahli sekuler dan kepentingan Kristen (Hill, 1995 : 126).

Awal berdiri Republika merupakan campur tangan presiden yang kala itu menjabat yaitu Soeharto, Hal tersebut dilakukan tatkala hubungan Soeharto dengan ABRI mulai menurun. Sehingga muncul gagasan-gagasan yang dianggap mampu untuk menyaingi kekuatan sekuler yang muncul. ABRI tidak lagi menjadi tumpuan presiden untuk memperkuat kekuasaannya kala itu sehingga dengan munculnya Republika diharapkan mampu mewakili suara pemerintah sedangkan peran Republika disisi lain dapat secara profesional membangun sebuah misi Islam (Hamad, 2004 : 126).

Setelah lama berdiri sekitar tahun 2000, Group Mahaka Media mengambil alih surat kabar Republika, dikarenakan utang yang semakin menumpuk. Group ini merupakan perusahaan media terbesar di Indonesia. Mereka menjadi induk pada media-media lainnya seperti Jak TV, Radio One Jakarta, Prambors, Majalah Golf Digest, A Plus Magazine, Mahaka Advertising dan lain sebagainya. Setelah itu pembenahan mulai dilakukan Republika, pada tahun 2004 Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri (RMM). Perkembangan terus berlanjut hingga pada tahun 2005, gelobanya mencapai angka 155.000 eksemplar dengan omzet 58

miliar. Setiap unit bisnis tersebut berhasil memperkuat diri dengan membangun karakter sehingga berdampak pada semakin kuatnya Group Mahaka Media (<http://www.mahakamedia.com/newsroom/category/2/press-release/6/program-issn-british-council-dan-harian-republika/0>, diakses tanggal 29 Mei 2012).

C. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini peneliti juga mencoba untuk sedikit membahas tentang penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang membahas tentang Kompas dan Republika. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk memberi sebuah tambahan data yang dapat dibandingkan dengan penelitian saat ini. Sehingga penelitian ini dapat menjadi koreksi bagi peneliti-peneliti terdahulu.

Penelitian terdahulu yang pertama ini ditulis oleh Bunga Ayu Indriyana yang mengambil judul "*Pers, Negara, Kekerasan dan Perempuan (Analisis Framing Berita Pemerkosaan Massal Mei 1998 pada Surat Kabar Kompas dan Republika)*". Dimana dalam penelitian ini memiliki bentuk penelitian yang serupa, yaitu melihat bagaimana media membingkai berita dari realitas sosial yang ada pada kala itu. Dalam penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sesudahnya. Sehingga walaupun diambil dengan judul yang sama mungkin dapat diteliti dengan metode yang berbeda.

Ada beberapa hal yang dapat diambil dari penelitian tersebut salah satu diantaranya adalah pada saat itu Surat Kabar Harian Republika belum diambil alih oleh Group Mahaka Media. Berawal dari sinilah muncul sebuah asumsi bahwa terdapat perbedaan antara frame yang kala itu terbentuk dengan frame yang

Ditegaskan pula oleh Indriyana bahwa ada sebagian curiga terhadap sistematisasi peristiwa ini didalangi oleh oknum-oknum negara. Keraguan atas keberpihakan tersebut memberikan keberpihakan terhadap negara, bahwa perkosaan adalah kekerasan terhadap negara.

Beberapa nama besar yang berada di balik Republika tersebut menunjukkan bahwa kemunculan Republika tidaklah berdasarkan perhitungan bisnis semata. Dikatakan oleh Alwi Shihab yang mengatakan bahwa ICMI akan bersikap netral dan aspiratif terhadap partai Islam, namun meskipun secara organisasi ICMI netral tapi beberapa tokohnya bebas melakukan kegiatan politik praktis di berbagai partai (Shihab dalam Indriyana, 2000 : 85).

Dan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian terdahulu tersebut adalah Kompas kala itu merupakan Koran yang sedang menghadapi berbagai kepentingan dan kekuasaan, dapat dikatakan selalu berada pada jalan tengah. Hal itu dikarenakan Kompas merupakan koran yang memiliki kepentingan bisnis dengan oplah yang besar dan dibawah naungan kelompok-kelompok yang berafiliasi nasrani. Kalimat yang dipakai Kompas cenderung santun sesuai dengan kode etik jurnalis.

Sedangkan Republika merupakan Koran yang dibentuk oleh ICMI yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Pemerintah yang kala itu menjabat serta beberapa kepentingan terhadap kelompok-kelompok Islam. Republika cenderung melindungi pemerintahan yang kala itu menjabat sebagai upaya untuk memberikan kesan yang baik terhadap Pemerintah dan kelompok Islam kepada

mengikuti kode etik jurnalistik agar terkesan lebih membaur dan renyah terhadap para pembaca.

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua ini ditulis oleh Sri Utami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2007. Dalam tulisannya Utami menuliskan tentang "*Analisis Framing Kompas dan Republika dalam Pemuatan Karikatur Nabi Muhammad SAW di Surat Kabar Denmark*". Pada penelitian tersebut digambarkan Republika baik di rubrik umum maupun internasional sangat menonjolkan ideologinya.

Dalam pembedingaiannya Republika mengkonstruksi bahwa karikatur Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah pelecehan dan penghinaan bagi umat Muslim se-dunia, selain itu Republika juga menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang disengaja oleh Negara Barat untuk memancing umat Muslim se-dunia (Utami, 2007 : 181).

Hal ini bisa dilihat sangat bertentangan dengan apa yang terdapat dalam ideologi Republika. Dimana Republika sangat memihak umat Muslim dengan berbagai kepentingan tertentu. Keperpihakan tersebut sangat mempengaruhi hasil akhir yang dimunculkan atau diberitakan Republika terhadap para pembaca. Dalam hal ini Republika secara terang-terangan memihak umat Muslim. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemberitaan tentang kesaksian warga Muslim yang berada di Denmark bahwa Pemerintah Denmark sangat tidak senonoh dalam memperlakukan umat Muslim (Utami, 2007 : 182).

Sementara itu berita yang dimuat Kompas dalam realitas peristiwa tersebut

Kompas cenderung berbelit-belit dalam pemberitaan tersebut dan terkesan menggunakan gaya cerita yang sopan dan menggunakan pilihan kata maupun kalimat sangat berhati-hati (Utami, 2007 : 184).

Frame Kompas cenderung lebih banyak menuliskan tentang demonstrasi yang terjadi saat itu bukan sebagai sebuah penentangan terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam frame Kompas diceritakan bahwa demonstrasi tersebut mengakibatkan banyaknya korban berjatuhan. Mulai dari merusak fasilitas umum sampai membakar bendera, semuanya secara detail diberitakan oleh Kompas (Utami, 2007 : 184). Artinya Kompas tidak berani secara langsung menentang apa yang telah diberitakan oleh Republika tetapi mengalihkan peristiwa tersebut menjadi sebuah isu yang lain.

Jelas kembali bahwa saat itu ideologi yang dimiliki oleh kedua belah media sangat terlihat dimana Republika yang berideologi Islam sangat menentang peristiwa tersebut, Sedangkan Kompas yang berasal dari Partai Katolik berusaha untuk mengalihkan isu yang satu kepada isu yang lain.

Hal semacam ini menjadi tambahan data bagi peneliti dalam menganalisis peristiwa yang terjadi saat ini yaitu tentang kontroversi Irshad Manji di Indonesia. Kedua penelitian tersebut dapat dijadikan tambahan data bagi peneliti saat ini karena memiliki konsep dan kronologi peristiwa yang hampir sama, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa penelitian saat ini masih dapat dikatakan orisinal dan dapat menjadi penambahan bagi penelitian terdahulu.